

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

I. NILAI INDEKS PERKEMBANGAN HARGA DI KABUPATEN LANGKAT

Kabupaten Langkat merupakan salah satu Kabupaten Non - Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara. Indeks Harga Pangan (IPH) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur perubahan harga pangan di suatu daerah. Di Kabupaten Langkat, pemantauan terhadap perkembangan nilai IPH sangat krusial untuk memahami dinamika pasar dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat yang mencakup harga bahan kebutuhan pokok, barang penting lainnya, dan jasa. Memahami perkembangan IPH membantu mengidentifikasi tren inflasi, daya beli masyarakat, dan kondisi ekonomi secara umum.

Sepanjang tahun 2024 terutama pada Triwulan III dan IV, Kabupaten Langkat mengalami penurunan IPH yang signifikan namun masih relatif dapat dikendalikan. Penurunan yang terjadi sejak bulan Agustus sampai dengan Desember 2024 mengalami tren penurunan yang lebih stabil, menggambarkan tantangan serta potensi yang ada di pasar pangan lokal.

1. Perubahan Nilai IPH di Kabupaten Langkat

Adapun nilai IPH di Kabupaten Langkat dapat dilihat melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Bulan Oktober sampai dengan Desember (Triwulan IV) Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Bulan Oktober 2024

Pada Minggu I hingga Minggu V Oktober 2024 Kabupaten Langkat mengalami deflasi. Tercatat akhir Oktober Minggu IV nilai IPH di Kabupaten Langkat mengalami deflasi sebesar 0.44% dengan komoditas yang memberikan andil deflasi terbesar diantaranya Cabai Merah, Bawang Merah, dan Daging Sapi.

1. Bulan November 2024

Pada Minggu I sampai dengan Minggu IV November 2024 IPH Kabupaten Langkat juga masih mengalami deflasi untuk setiap minggunya. Dengan deflasi IPH pada Minggu I sebesar -0,35 % dan hingga Minggu V perubahan IPH menjadi -0,03%. Hal ini menunjukkan penurunan harga barang dan jasa yang tidak sekuat pada minggu pertama, sehingga deflasi terus mengalami perbaikan. Dengan komoditas yang memberikan andil perubahan yakni Cabai Rawit, Udang Basah, Jeruk.

1. Bulan Desember 2024

Pada Minggu I Kabupaten Langkat menunjukkan perubahan IPH sebesar 0,25%. Sedangkan Minggu II, III dan IV masih tetap mengalami deflasi namun menunjukkan peningkatan dibandingkan pada bulan Juli dan Agustus. Komoditas yang memberikan andil perubahan harga yakni daging sapi, cabai merah, bawang merah, minyak goreng dan bawang putih.

Tabel 1. Indeks Perkembangan Harga di Kabupaten Langkat Periode Oktober sampai dengan November 2024

| BULAN | MINGGU ke- | IPH (%) | KOMODITAS PENYUMBANG IPH |
|----------|------------|---------|--|
| OKTOBER | 1 | 0,14 | Bawang Merah, Udang Basah, Tahu Mentah |
| | 2 | 0,26 | Bawang Merah, Udang Basah, Tahu Mentah |
| | 3 | 0,39 | Bawang Merah, Udang Basah, Cabai Merah |
| | 4 | 0,58 | Bawang Merah, Cabai Merah, Bawang Putih |
| | 5 | 0,44 | Bawang Merah, Cabai Merah, Bawang Putih |
| NOVEMBER | 1 | -0,35 | Cabai Rawit, Udang Basah, Jeruk |
| | 2 | -0.15 | Cabai Rawit, Udang Basah, Jeruk |
| | 3 | -0.18 | Cabai Rawit, Cabai Merah, Udang Basah |
| | 4 | -0.03 | Cabai Rawit, Udang Basah, Jeruk |
| DESEMBER | 1 | 0.25 | Cabai Rawit, Minyak Goreng, Tahu Mentah |
| | 2 | 0.13 | Cabai Rawit, Minyak Goreng, Tahu Menatah |
| | 3 | 0.33 | Cabai Rawit, Cabai Merah, Minyak Goreng |
| | 4 | 0.58 | Cabai Rawit, Cabai Merah, Minyak Goreng |

Sumber : Data BPS Kabupaten Langkat

Dinamika Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Langkat pada Triwulan IV ini tidak luput dari atensi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia serta Pj. Bupati Langkat dalam menginstruksikan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat agar segera melakukan intervensi terhadap kenaikan bahan pokok.

Komoditas andil perubahan harga seperti Cabai Merah, Bawang Merah, Daging Sapi, Bawang Merah, Minyak Goreng, Bawang Putih dan Gula Pasir menjadi penyumbang utama dalam perubahan nilai IPH di Kabupaten Langkat selama Juli hingga September. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi harga, seperti pasokan, permintaan, dan kebijakan pemerintah, sangat penting untuk mengantisipasi dan mengelola perubahan harga di masa mendatang.

2. Perkembangan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya.

Dari hasil monitoring dan survey beberapa komoditas bahan pokok di 3 wilayah pasar tradisionial yakni Kecamatan Stabat, Kuala dan Babalan di Kabupaten Langkat sejak bulan Oktober, November dan Desember 2024, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. Harga Rata-Rata Bahan Pokok di Kab. Langkat Periode Oktober – Desember 2024

| No. | KOMODITI | SATUAN | OKTOBER (Rp) | NOVEMBER (Rp) | DESEMBER (Rp) |
|-----|---------------------------|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | Gula Pasir | kg | 17,000 | 17,000 | 17.000 |
| 2 | Minyak Goreng (Minyakita) | liter | 15,500 | 16,000 | 16.000 |
| 3 | Daging Ayam Ras / Broiler | kg | 30,000 | 30,800 | 32.000 |
| 4 | Daging Ayam Kampung | kg | 60,000 | 60,000 | 60.000 |
| 5 | Telur Ayam Ras / Broiler | kg | 28,900 | 28,900 | 28.900 |
| 6 | Cabai Merah | kg | 25,900 | 24,700 | 33.000 |
| 7 | Cabai Rawit | kg | 32,167 | 27,600 | 45.000 |
| 8 | Bawang Merah | kg | 27,467 | 30,933 | 34.300 |
| 9 | Bawang Putih | kg | 37,133 | 39,533 | 40.100 |
| 10 | Beras Premium | kg | 14,500 | 14,500 | 14.500 |
| 11 | Beras Medium | kg | 13,500 | 13,500 | 13.500 |
| 12 | Tepung Terigu | kg | 11,000 | 11,000 | 11.000 |
| 13 | Tahu Mentah | kg | 14,000 | 14,000 | 14.000 |
| 14 | Udang | kg | 86,833 | 85,000 | 85.000 |
| 15 | Pisang | kg | 15,000 | 15,000 | 15.000 |
| 16 | Ikan Kembung | kg | 35,000 | 35,000 | 35.000 |
| 17 | Susu Bubuk Balita | 400 gr | 40,700 | 40,700 | 40.700 |
| 18 | Mie Instan | bks | 3,000 | 3,000 | 3.000 |
| 19 | Susu Bubuk | 400 gr | 50,000 | 50,000 | 50.000 |
| 20 | Daging Sapi | kg | 120,000 | 120,000 | 120.000 |
| 21 | Tempe | kg | 15,000 | 15,000 | 15.000 |
| 22 | Jeruk | kg | 25,000 | 25,000 | 25.000 |

Sumber : Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Langkat

Berdasarkan data di atas diperoleh informasi bahwa selama Triwulan IV sebagian besar harga-harga komoditas bahan pokok menunjukkan variasi yang signifikan yakni stabil dan cenderung menunjukkan penurunan. Perubahan harga untuk beberapa komoditas penting dari bulan Oktober hingga Desember yakni Gula Pasir, Daging Ayam Kampung, Telur Ayam Ras, Beras Premium dan Medium, Tepung Terigu, Tahu Mentah, Mie Instan, dan Tempe semua komoditas ini menunjukkan kestabilan harga selama 3 bulan.

Sedangkan untuk Komoditas teratas dengan Fluktuasi Harga yakni Minyak Goreng (Minyakita). Hal ini merupakan dampak dari Permendag Nomor 18 Tahun 2024 Minyak Goreng Sawit Kemasan Dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat yang mengatur HET Minyakita yang semula Rp.14.000/liter menjadi Rp.15.700/liter.

Berdasarkan data tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga bahan pokok penting melonjak naik pada bulan Desember 2024 yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2025.

Namun stabilisasi harga beras dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dengan suksesnya gerakan tanam serta pemberian bantuan sarpras peningkatan produktivitas pertanian oleh Kementan dan Bank Indonesia.

3. Risiko ke Depan
 4. Komoditas Cabai Merah, Bawang Merah, dan Bawang Putih masih bergantung dengan stok dari luar daerah, terutama bawang putih yang ketika terjadi kenaikan tidak dapat dilakukan mitigasi cepat, hal ini dikarenakan bawang putih merupakan komoditas impor. Risiko kelangkaan 3 (tiga) komoditas ini sangat mungkin terjadi kedepan mengingat daerah Langkat bukan merupakan produsen ketiga komoditas tersebut.
 5. Harga cabai merah cenderung mengalami fluktuasi harga yang lebih stabil pada Triwulan IV, untuk kedepan dapat terjadi lonjakan harga yang sangat drastis mengingat musim panas yang akan dihadapi pada awal 2025. Pengolahan cabai menjadi produk lainnya seperti bubuk cabai dan cabai kering dapat menjadi solusi alternatif untuk masyarakat.
 6. Keterbatasan data pangan yang menyebabkan sulitnya untuk melakukan pemetaan peta surplus/defisit pangan di daerah menyebabkan sering terjadi kesenjangan harga bahan pokok penting di daerah.
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

II. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN IPH DI KABUPATEN LANGKAT

Permasalahan yang mempengaruhi Indeks Perkembangan Harga di Kabupaten Langkat sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang terintegrasi untuk diatasi. Keterbatasan infrastruktur distribusi, ketergantungan pada pasokan luar daerah, variabilitas produksi pertanian, kurangnya data dan informasi pasar, kebijakan harga dan tarif yang tidak konsisten, kurangnya pengawasan dan regulasi pasar, pengaruh ekonomi global, kurangnya diversifikasi ekonomi, serta perubahan permintaan konsumen adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan fluktuasi IPH.

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Langkat pada Triwulan IV Tahun 2024 antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur Distribusi

Masalah: Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan yang rusak dan terbatasnya sarana transportasi, menghambat distribusi barang dan jasa di Kabupaten Langkat.

Dampak: Ketidakstabilan pasokan barang di pasar menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan, khususnya untuk barang-barang kebutuhan pokok.

2. Ketergantungan pada Pasokan dari Luar Daerah

Masalah: Kabupaten Langkat masih sangat bergantung pada pasokan barang dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan lokal. (komoditas apa saja yang masih bergantung pada stok dari luar daerah)

Dampak: Ketergantungan ini membuat harga di Kabupaten Langkat rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan dari daerah pemasok.

3. Variabilitas Produksi Pertanian

Masalah: Produksi padi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan faktor musiman.

Dampak: Ketidakstabilan produksi menyebabkan fluktuasi harga komoditas pertanian, yang berdampak langsung pada IPH.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

III. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN DI DAERAH

Adapun kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengimplementasikan strategi 4K yang disepakati yaitu, :

1. KETERJANGKAUAN HARGA :

Dalam memastikan harga komoditas tetap stabil agar terjangkau masyarakat, maka upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

2024. Melaksanakan sidak pasar bahan pokok penting bertempat di Pasar Tradisional Stabat Baru Kecamatan Stabat pada tanggal 12 November 2024.
2025. Melakukan monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok penting menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru 2025 bertempat di Pasar Tradisional Stabat Baru Kecamatan Stabat pada tanggal 12 Desember 2024 dan Pasar Kecamatan Kuala pada 23 Desember 2024
2026. Melaksanakan pembinaan dan monitoring untuk mengecek ketersediaan, pendistribusian serta HET Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU dan Gas LPG Tabung 3 Kilogram di pangkalan wilayah kerja Kabupaten Langkat.
2027. Tersedianya Pasar Tani (Pasar Pekan) di 18 Kecamatan Kabupaten Langkat dengan jumlah pedagang sebanyak 906.
2028. Launching Beras Langkat dan Beras ASN pada tanggal 10 Desember 2024 sebagai implementasi dari program *close loop* beras hasil kerja sama dengan KPw Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Program ini mengintegrasikan sisi hulu yaitu yaitu:
 - sarana prasarana pertanian seperti Hand Tractor, Pompa Air, Pupuk dan Pestisida
 - *capacity building* kelembagaan pertanian dengan mendatangkan narasumber petani champion Kabupaten Sleman Provinsi DIY.
 - Forum Group Discussion Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida untuk memastikan distribusi pupuk tepat sasaran sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Di sisi hilir produksi beras disalurkan kepada:

- Koperasi ASN Oryza

2. **KETERSEDIAAN PASOKAN :**

Sebagai upaya dalam menjaga ketersediaan pasokan komoditas di pasar, pemerintah Kabupaten Langkat telah melakukan beberapa langkah terkait, antara lain:

1. Peninjauan lokasi program listrik masuk sawah bertempat di Desa Sambirejo Kecamatan Binjai pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan PT. PLN Persero UP3 Binjai.
2. Kegiatan launching program inovasi listrik masuk sawah dengan layanan Binjai Smart Electric Point (Bis Lipin) yang dibuka langsung oleh Bapak M. Faisal Hasrimy selaku Pj. Bupati Langkat dan dihadiri oleh TNI/Polri, Bank Indonesia, PLN, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait lainnya pada tanggal 8 Oktober 2024 bertempat di Desa Sambirejo Kecamatan Binjai. Selain itu, pada hari yang sama juga dilakukan launching program inovasi lainnya yakni listrik masuk tambak bertempat di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang yang merupakan sebuah terobosan dalam mendukung sektor pertanian bagi para petani dan penambak udang di wilayah Kabupaten Langkat.
3. Tim KP3 Kabupaten Langkat melakukan peninjauan penyaluran pupuk bersubsidi bertempat di Kios Pupuk UD. Makmur Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu pada tanggal 10 Oktober 2024.
4. Operasi pengawasan terhadap barang kena cukai, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bertempat di Kecamatan Pangkalan Susu pada tanggal 16 Oktober 2024.
5. Monitoring stok beras bertempat di Gudang Bulog Stabat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru 2025 pada tanggal 12 November 2024 yang terpantau masih aman dengan stok 800 ton beras.
6. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Kabupaten Langkat yang dilaksanakan bersamaan dengan Car Free Day dengan antusias masyarakat lebih dari 200 pembeli dengan komoditas yang dijual berupa minyak goreng, Beras SPHP, Bawang Merah, Cabai Merah, Gula Pasir dan Terigu bertempat di Alun-alun T. Amir Hamzah Stabat pada tanggal 17 November 2024.
7. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum BULOG di Kabupaten Langkat pada Desember 2024 mencapai 2.502.520 Ton yang disalurkan oleh masyarakat Kabupaten Langkat sebagai program bantuan pangan pemerintah pusat.
8. Gerakan Tanam (Gertam) Padi dalam rangka Percepatan Tanam Padi di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 Desember 2024 bertempat di Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI Bapak Gibran Rakabuming sekaligus pemberian fasilitas *rice transplanter*, *hand tractor*, dan pompa air kepada Gapoktan di Kecamatan Sirapit sebagai penunjang produktivitas pertanian.

9. **KELANCARAN DISTRIBUSI :**

Sebagai upaya untuk mendukung Pengendalian Inflasi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Langkat mengambil kebijakan:

1. Bantuan transportasi darat (Bus) kepada masyarakat umum secara gratis dengan rute Mesjid Raya Kota Stabat menuju Stasisun Kereta Api Kwaia Bingai (PP).
2. Bantuan transportasi air (Speed Boat) dengan rute Dermaga Tanjung Ibus Secanggang menuju Dermaga Jaring Halus Secanggang yang diperuntukan untuk ASN, Guru Honorer dan Tenaga Kesehatan secara gratis.
3. Bantuan pompanisasi untuk peningkatan produksi padi melalui APBN Pusat Tahun 2024
o Kementerian Pertanian RI dengan usulan sebanyak 138 unit dan sudah terealisasi

sebanyak 35 unit yang tersebar di 6 Kecamatan yakni Selesai, Wampu, Hinai, Kuala, Secanggang dan Binjai.

4. Bantuan benih padi seluas 4.899 Ha melalui APBN Pusat Tahun 2024 kepada kelompok tani yang tersebar di 10 Kecamatan yaitu Selesai, Pematang Jaya, Bahorok, Tanjung Pura, Secanggang, Kuala, Stabat, Binjai, Babalan dan Besitang.
5. Upaya peningkatan produksi padi melalui inovasi Sistem Tanam Jajar Legowo Empat Satu dan Dua Satu Hasil Produksi Meningkat (Sitarwo Patuh Siangkat) yang dapat menghasilkan produksi ± 7.875 Kg/Ha Gabah Kering Panen (GKP).
6. Optimasi Lahan Rawa (OPLA) di Kabupaten Langkat seluas 8.200 Ha di 8 Kecamatan Gebang, Babalan, Sei Lapan, Hinai, Secanggang, Sirapit, Pangkalan Susu dan Brandan Barat untuk peningkatan produksi padi melalui APBN Pusat Tahun 2024 dengan dibantu Pompanisasi dan Sarana Produksi seperti Benih Padi, Pupuk NPK, Dolomit dan Pestisida dengan produksi yang dapat dihasilkan sebanyak 147.600 ton/Ha.
7. Pemanfaatan Pekarangan Lestari (P2L) melalui dana DAK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Program Upaya Penurunan Angka Stunting dengan bantuan berupa bangunan rumah benih, penyediaan media tanam dan sarana produksi serta benih sayuran yang diberikan kepada KWT Srikandi Kecamatan Bahorok, KWT Mawar Kecamatan Kuala, KWT Sri Rahayu dan KWT Cladium Kecamatan Selesai serta KWT Kecamatan Binjai dan KWT Kecamatan Stabat.
8. Bantuan pangan berupa telur 10 butir dan daging ayam 1 Kg dengan sasaran ibu hamil, anak balita terindikasi kurang gizi dan keluarga ekonomi rendah dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Langkat bertempat di Kantor Pos Stabat pada tanggal 6 September 2024.
9. Pemberian bantuan Sarpras dari Bank Indonesia berupa handtarctor, embung, pupuk dan pestisida serta sarpras pendukung lainnya kepada Gapoktan Mulai Tani Kecamatan Binjai dan Gapoktan Agro Lestari Kecamatan Stabat guna peningkatan produksi pertanian sekaligus MoU Kerjasama Pengendalian Inflasi antara Bank Indonesia Kanwil Sumut dengan Pemkab Langkat bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai pada tanggal 19 September 2024.
10. Bantuan tanam cabai dan Sarprodi seluas 4 Ha yang tersebar di Kecamatan Sei Bingai seluas 3 Ha dan Kecamatan Secanggang seluas 1 Ha yang terbagi menjadi 3 kelompok tani.
11. Penyaluran bantuan pangan berupa daging ayam dan telur kepada penerima manfaat tahap 3 guna penurunan angka stunting di Kabupaten Langkat bertempat di Kantor Pos Stabat.
12. Mendorong penjualan komoditas melalui pemanfaatan e-Pasar Kabupaten Langkat.

4. KOMUNIKASI EFEKTIF :

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pengendalian Inflasi, maka diperlakukan berbagai upaya komunikasi melalui Rapat-Rapat Teknis, diantaranya:

1. Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 bersama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual (Zoom Meeting) yang dipimpin langsung oleh Bapak Faisal Hasrimy selaku Pj. Bupati Langkat dan Sekretaris Daerah yang juga turut dihadiri dari unsur TNI/Polri, Bulog, BPS Langkat serta Kepala OPD di jajaran Pemkab Langkat lainnya bertempat di Ruang Langkat Command Center (LCC) Kantor Bupati pada setiap Senin mulai bulan Oktober, November dan Desember 2024 (Triwulan IV).
2. Rapat Koordinasi Tim Pembinaan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Langkat yang dipimpin langsung oleh Bapak Amril, S.Sos, M.AP selaku Sekretaris

Daerah Kabupaten Langkat dan dihadiri dari unsur TNI/Polri, Kejaksaan Negeri Stabat serta instansi terkait lainnya yang bertempat di Ruang Rapat Press Conference pada tanggal 15 Oktober 2024.

3. High Level Meeting Tim Audensi SKK Migas Perwakilan Sumatera Utara dan KKS Wilayah Kabupaten Langkat bertempat di Rumah Dinas Bupati Langkat pada tanggal 16 Oktober 2024.
 4. High Level Meeting Tindaklanjut Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Aceh Tamiang bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat pada tanggal 16 Oktober 2024.
 5. Rapat Koordinasi Tim Pembinaan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Langkat yang dipimpin Bapak Sekretaris Daerah dan dihadiri dari unsur TNI/Polri, Kejaksaan Negeri Stabat, Distributor Pupuk dan Kios Pupuk serta Dinas/Instansi terkait Pemkab Langkat bertempat di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada tanggal 11 November 2024.
 6. Mewakili Provinsi Sumatera Utara dalam Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 Sinergi dan Kolaborasi dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan dan stabilitas harga bertempat di The Meru Hotel Sanur Provinsi Bali pada tanggal 6 November 2024.
 7. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat dengan Koperasi Oryza dan Pemilik Kilang Beras Warga tentang pengadaan dan pendistribusian beras lokal bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat pada tanggal 31 Oktober 2024.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

IV. EVALUASI KEBIJAKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan terkait upaya pengendalian inflasi di daerah, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Langkat mengevaluasi beberapa kebijakan, yaitu :

1. Pemantauan stok dan kualitas pangan agar dilakukan secara intensif oleh TPID bersama Satgas Pangan termasuk melaksanakan sidak ke beberapa pasar tradisional bersama dengan Forkopimda di Kabupaten Langkat.
2. Meningkatkan kembali kegiatan Gerakan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah sebagai langkah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan secara berkelanjutan sebagai antisipasi kenaikan harga barang pokok penting sehingga stabilitas inflasi daerah dapat terjaga.
3. Mendorong implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang sudah ada dan memperluas kerja sama dengan daerah lainnya.
4. Menggiatkan *Business Matching* antara produsen dan distributor bersama dengan pihak ketiga seperti BUMD, koperasi, kelompok tani, dan nelayan dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan, perluasan jaringan pemasaran dan akuntabilitas penyaluran bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi pangan.
5. Melakukan upaya pengawasan oleh tim pengendalian inflasi daerah (TPID) untuk memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang dalam rangka spekulasi.
6. Meningkatkan efisiensi produksi pangan melalui sistem budidaya guna menjaga ketersediaan bahan pangan, pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dalam

jual/beli barang, dan pembangunan sarana infrastruktur yang baik untuk kelancaran distribusi pangan.

7. Membangun sinergi yang baik dalam bekerjasama antara Dinas/Instansi terkait yang tergabung dalam TPID dengan menjaga kualitas data dalam menyajikan informasi atau penyampaian laporan yang valid terkait harga kebutuhan pokok penting dan ketersediaan barang.
 8. Mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemkab Langkat pada saat terjadinya kebutuhan yang mendesak dalam rangka pengendalian inflasi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
 9. Menciptakan inovasi kebijakan dengan mensinkronisasikan program kerja pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pengendalian inflasi dalam menjaga daya beli masyarakat demi stabilitas keterjangkauan harga.
 10. Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak (Gertak) Kabupaten Langkat melalui implementasi *close loop* Secara bertahap implementasi upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Langkat yang bersifat *close loop* akan diterapkan terintegrasi pada komoditas beras dengan program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KEKDA) serta dukungan pemerintah daerah dengan melibatkan kelompok tani, agregator/*offtaker* dan TPID Kabupaten Langkat.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

V. REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi maka Pemerintah Kabupaten Langkat merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi sebagai berikut :

1. Intensifikasi operasi pasar murah/ Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Bank Indonesia, TNI, POLRI, BULOG, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan pihak lainnya untuk komoditas bahan pokok penting terutama Cabai Merah, Bawang Merah, Minyak Goreng dan Beras disertai dengan upaya menambah pasokan dari daerah lain yang memiliki tingkat harga yang lebih rendah.
2. Memperkuat pemantauan kondisi pasokan dan harga bahan pangan di tingkat pedagang dan distributor dengan melakukan koordinasi dengan distributor untuk memperoleh informasi kondisi pasokan terkini dan harga ke depan sebagai upaya antisipasi pengendalian inflasi.
3. Terus memperkuat koordinasi antar Stakeholders yaitu Bank Indonesia, TNI, Polri, Kejaksaan, BULOG, PT. PLN Persero, Pertamina, Badan Pusat Statistik (BPS), Pupuk Indonesia, Supplier dan Distributor komoditas bahan pokok terkait untuk melakukan intervensi terhadap komoditas penyumbang utama inflasi dalam perubahan/kenaikan IPH sebagai upaya dalam menstabilkan harga komoditi tersebut.
4. Meningkatkan pengawasan distribusi Pupuk Bersubsidi melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
5. Monitoring dan pengawasan distribusi LPG 3Kg Bersubsidi, dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di setiap SPBU dan distributor untuk mencegah penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM.
6. Mendorong peningkatan efisiensi biaya logistik, interkoneksi antar Daerah ataupun Provinsi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan membangun sarana infrastruktur yang baik sehingga dapat mendorong kelancaran distribusi/penjualan barang.
7. Melaksanakan gerakan menanam dengan menanam komoditas hortikultura seperti cabai

di pekarangan rumah, sekolah maupun pondok pesantren untuk menjaga ketersediaan komoditas dan ketahanan

8. Melakukan sidak pasar, monitoring dan pengawasan terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok penting secara intensif bersama Forkopimda, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan Kabupaten Langkat.
9. Penyediaan Informasi Harga dan ketersediaan/stok komoditas secara *real time*.
10. Kampanye belanja bijak, no panic buying, serta belanja online.
11. Optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten/Kota lainnya penghasil komoditas
12. Mengimplementasikan skema close loop melalui :
 - Pemberian bantuan kepada RMU offtaker guna peningkatan kualitas produksi beras dan meningkatkan nilai jual.
 - Kerjasama antara RMU dengan retail modern, rumah makan, dan pesantren

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Langkat disusun untuk menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.